

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulrasyid Priyatna, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2002.
- Anwar Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung. Refika Aditama, 2008.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bagong, Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Dja'is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2008.
- Eri Safira, Martha, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo, Nata Karya, 2017.
- G.H.S Lumban, Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alumni. 2004.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta. Liberty. 2006.

- Mustofa, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Yogyakarta, Karya Media, 2014.
- Muchtar Oemar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya, Airlangga University Press, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali Persada, 1993.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center Of Documentation and Studies Of Bussiness Law, 2003.
- Noer Shidqi, *Hukum Pengawasan Notaris*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana, 2020.
- Pajriani Evy, *Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Modul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan, 2020.
- Pitlo, A, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Internusa, 1986.
- Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung, Nusa Media, 2008.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2014.
- Rasyid, Laila M dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe, Unimal Press, 2015.
- Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahandi Indonesia*, Mataram, Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, 1995.
- Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press. 2007.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Sodik, Ali dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta Literasi Media, 2015.

Sesung, Rusdianto, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini dan Jeffry Tanugraha, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia. 2017.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 08/PERKUM/INI/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia.

Kode Etik Notaris.

### C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 perihal asas *asas legitima persona standi in judicio*, tanggal 7 Juli 1971.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 perihal *judex facti* dalam amar putusannya membatalkan "Akta Notaris", tanggal 5 September 1973.

Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005 perihal pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan, tanggal 27 Februari 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pdt/2015 perihal ditariknya notaris sebagai turut tergugat dalam pembatalan akta perjanjian kerjasama, tanggal 26 November 2015.

### D. Jurnal

Anita Afriana. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya". *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol.1, No.2, Mei 2020.

Ayuk Septianingsih, Komang, *et al.* " Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No.3, 2020.

Adelia Clarisa dan Kartika Anjelina. " Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim". *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol.7, No.03, 2022.

Ayu Made Widhasani dan Pieter Everhardus, "Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan", *Jurnal Justicia Sains;Ilmu Hukum*, Vol.06, No.02, Maret 2022.

Bagus Paramanigrat Ida, I Wayan parsa, I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik". *Jurnal Acta Comittas*. Vol.3, No.1.2018.

Borman Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol 03, No. 01, 2019.

Pramono Dedy, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia ", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.12, No.3, 2015.

Rasmadi I Putu, *et al.* "Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan". *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.2, No.1, 2016.

- Rifiana Agustin, Yetniwati, Diana Amir, "Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris yang Berintegritas di Era Globalisasi", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 6, No.2, Oktober 2022.
- Ngurah Adnyana I Gusti. "Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.13, No.1, 2022.
- Muflichah Siti, Trusto Subekti, Haedah Faradz. "Eksepsi Plurium Litis Consortium", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.2, 2008.
- Madyastuti, Ratna, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.5, No.3, Juli 2020
- Mediantara Andhika, "Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY", *Jurnal Indonesian Notary*, Vol.4, No.2, 2022.
- Tjukup, I Ketut *et al.* "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol.2, 2016.

#### **E. Internet**

- Bizlaw, "Macam-macam Akta Notaris", <https://bizlaw.co.id/macam-macam-akta-notaris/>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2022).
- Hukum Expert, "Perbedaan Tergugat dan Turut Tergugat", <https://hukumexpert.com/perbedaan-tergugat-dan-turut-tergugat/?detail=ulasan>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2022)
- Kanwil Bali, "Buka Secara Resmi Seminar Nasional Peringatan HUT INI ke-115, Dirjen AHU Sampaikan Pentingnya Peningkatan Efektivitas Pembinaan dan Penegakan Kode Etik Notaris", <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5728-buka-secara-resmi-seminar-nasional-peringatan-hut-ini-ke-115-dirjen-ahu-sampaikan-pentingnya-peningkatan-efektivitas-pembinaan-dan-penegakan-kode-etik-notaris>, (diakses tanggal 12 September tahun 2023).
- Pengadilan Agama Trenggalek, "Turut Tergugat dalam Pusaran Sengketa Perdata", <https://www.pa-trenggalek.go.id/informasi-pengadilan/319-artikel-turut-tergugat-dalam-pusaran-sengketa-perdata-agama>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2022).

## **F. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Devi Almas Nur A. "Perbedaan Implikasi Hukum Atas Kedudukan Tergugat Dan Turut Tergugat Bagi Notaris Dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Merupakan *Partij Akta*(Studi Perbandingan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/Pn Jkt.Sel Dan Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/Pn Sby)". Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2021.
- Kurniawan. "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Putusan No.72/PDT.G/2006/PN.PTK)". Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2009.
- Kusumawati Lanny. "Tanggung Jawab Jabatan Notaris". Disertasi. Universitas Airlangga. Surabaya. 2001.
- Meliala Rio Verty N. "Pertanggungjawaban Notaris Purna Tugas Sebagai Turut Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Studi Kasus Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PN.SBY)". Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2021.
- Pambudi Teguh. "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi". Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.